
HUKUM

ACARA
PERADILAN
TATA USAHA
NEGARA

DWI PUTRI CAHYAWATI, SH., MH.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh:

DWI PUTRI CAHYAWATI, SH.MH.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta: Gramata Publishing, 2011

x + 290 halaman; 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-8986-29-8

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan pada Gramata Publishing

Penulis

DWI PUTRI CAHYAWATI, SH.MH.

Editor Bahasa

Dennis Afri Saptanto

Desain Cover

Taufiqur Rohman & Eka Pramuktia

Penata Letak

Dennis Afri Saptanto

2012-03-55

Diterbitkan oleh:

Gramata Publishing

Anggota IKAPI

Jl. Nusantara Raya No. 113 Depok

Telp (021) 7108 2664; Faks (021) 7520 833

Email: gramata_publishing@yahoo.com

<http://www.gramatapublishing.com>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Gramata Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana: Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh:

DWI PUTRI CAHYAWATI, SH.MH.

 gramata
publishing

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., berkat anugerah, dan rahmat-Nya yang luar biasa akhirnya buku ini dapat Penulis selesaikan. Kehadiran buku ini merupakan upaya Penulis dalam melengkapi kebutuhan materi perkuliahan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah disesuaikan pembahasannya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Materi dasar yang disajikan masih tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang selama ini menjadi pijakan dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, seiring dengan perkembangan dunia hukum di Indonesia, terpengaruh oleh amandemen UUD 1945 yang juga membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusi, maka untuk lebih menjamin prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, PTUN perlu juga menyesuaikan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga dalam kurun waktu 19 (Sembilan belas) tahun sejak PTUN efektif dilaksanakan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah dua kali mengalami perubahan. Diundangkannya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, telah mengilhami penulis untuk menggagas terwujudnya buku ini.

Penyajian materi yang dikupas dalam buku ini, tidak hanya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, melainkan juga disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan lain di bidang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, selain mengedepankan aktualisasi Hukum Acara PTUN, Penulis juga mengutamakan realisasi dari eksistensi PTUN itu sendiri.

Kehadiran buku ini tentu saja telah melibatkan banyak pihak, untuk itulah pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih, terutama kepada kedua orang tua Penulis dan bapak mertua (almarhum) dan ibu mertua yang tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan Penulis. Suamiku Dr. M. Ridwan Hamzah, SH., Msi. dan anak-anakku tersayang (Putri Puang Rabitha Hamzah dan Putra Puang Tanra AHA Hamzah) yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat. Saudara Dr. Frans Sayogie, SH. Yang telah memberi jalan bagi terbitnya buku ini, terima kasih juga atas motivasinya. Kepada ananda Marta Satria Putra, SH. MH. (Hakim pada PTUN Palangkaraya), serta ananda Kusuma Firdaus, SH. (Hakim pada PTUN Jakarta) terima kasih atas masukan dan data-data terbaru seputar PTUN, ananda Ibnu Sina Chandranegara, SH, serta adikku Siswo Triputro Jalu, ST. yang telah terlibat langsung dalam proses *editing*.

Pimpinan dan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pimpinan dan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, serta Pimpinan dan rekan-rekan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta yang selalu memberikan motivasi, Penulis sangat berterima kasih. Kepada pihak penerbit, juga saudara Mashabi yang telah menjadi fasilitator, Penulis ucapkan terima kasih.

Secara khusus tak lupa kepada suami tercinta yang tepat

berulang tahun ke-49, pada tanggal 11 Desember 2011, dan anak-anakku tersayang sebagai persembahan karya tulis saya ini semoga Allah swt. tetap memberi rezeki dan perlindungan-Nya menjadikan kami sekeluarga bahagia *sakinah, marwaddah wa rohmah*.

Segi kemanfaatan buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, melainkan dapat juga bermanfaat bagi para praktisi hukum, agar lebih dapat memahami tekhnik dan mekanisme beracara di PTUN. Penulis sangat membuka diri untuk sejumlah saran dan masukan bagi kesempurnaan buku ini kelak, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan.

Wassalammualaikum., Wr.Wb.

Jakarta, 11 Desember 2011

Penulis

(Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.....	1
B. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara.....	2
C. Sejarah Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	3
D. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	7
BAB II OBYEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA	11
BAB III KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	19
A. Kompetensi Absolut	19
B. Kompetensi Relatif	24
BAB IV UPAYA ADMINISTRATIF DAN SENGKETA KEPEGAWAIAN	27
BAB V PRAKTIK GUGATAN TATA USAHA NEGARA	39
A. GUGATAN.....	39
B. Mekanisme Pengajuan Gugatan	49
C. Pengaruh keadaan Terhadap Gugatan	52

D. Gugat Provisi.....	55
E. Gugat Intervensi	57
F. Kehadiran Kuasa Hukum	61

BAB VI JENIS-JENIS PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TATA USAHA	67
A. <i>Dismissal Process</i> (Rapat Permusyawaratan)	67
B. Pemeriksaan dengan Acara Singkat	70
C. Pemeriksaan Persiapan	73
D. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa	76
E. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.....	81
BAB VII PEMBUKTIAN	85
A. Surat atau Tulisan	86
B. Keterangan Ahli	89
C. Keterangan saksi.....	91
D. Pengakuan Para Pihak	93
E. Pengetahuan Hakim.....	93
BAB VIII PUTUSAN	95
A. Pengertian Putusan	95
B. Jenis-Jenis Putusan	97
C. Amar Putusan PTUN	98
D. Materi Muatan Putusan PTUN	101
BAB IX UPAYA HUKUM	105
A. Upaya Hukum Biasa	105
B. Upaya Hukum Luar Biasa	118

BAB X EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	127
A. Pengertian dan Mekanisme Eksekusi	127
B. Bentuk-Bentuk Eksekusi PTUN	131
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	155
BIODATA SINGKAT PENULIS.....	289

A. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang rumusannya sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang rumusannya sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam ayat (2) dinyatakan, bahwa “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

HUKUM

ACARA
PERADILAN
TATA USAHA
NEGARA

Peran hukum dalam suatu negara modern saat ini sangatlah berkembang dengan pesat. Salah satu cabang hukum yang terus mengalami perkembangan adalah Hukum Tata Usaha Negara. Dalam suatu negara hukum tidaklah mungkin dapat mengesampingkan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan hadirnya suatu Peradilan Tata Usaha Negara.

Sejak bergulirnya era reformasi, maka tuntutan untuk menciptakan suatu keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia menjadi tidak terelakkan. Penataan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang juga menyentuh pembenahan Peradilan Tata Usaha Negara mendorong kebutuhan bagi seluruh kalangan untuk mengetahui mengenai bagaimana Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terkini sesuai dengan perubahan struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dwi Putri Cahyawati, SH. MH menghadirkan suatu karya yang menyajikan pembahasan secara komprehensif Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Karya ini juga membahas secara analitis tentang kehadiran UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Perundang-Undangan yang terkait lainnya. Pembahasan yang padat dan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber utama bagi setiap kalangan untuk mengetahui Hukum Tata Usaha Negara dan kegunaannya dalam praktek kehidupan bernegara.

ISBN 978-602-8986-29-8



9 786028 986298

Kategori Hukum

 **gramata**
publishing

Gramata Publishing
Jl. Nusantara Raya No. 113 Depok
Telp. (021) 7108 2664; Faks. (021) 7520 833
Email: gramata_publishing@yahoo.com
<http://www.gramatapublishing.com>